

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KAPRODI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian	12
C. Identifikasi Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan	23
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Jenis Data dan Teknik pengumpulan data.....	26
4. Analisis Data	28

BAB II

TINJAUAN TEORETIS PERUBAHAN KONSTITUSI, DOKTRIN

***CONSTITUTIONAL DISMEMBERMENT* DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI..... 30**

A. Teori Perubahan Konstitusi.....	30
1. Konsep Perubahan Konstitusi	30
a. Pembatasan dalam Perubahan Konstitusi.....	32
b. Metode Perubahan Konstitusi	33
c. Pendekatan dalam Perubahan Konstitusi	36
d. Karakter Utama Amandemen.....	40
2. Constitutional Dismemberment.....	44
a. Identitas Konstitusi	50
b. Nilai dan prinsip konstitusi	53
c. Desain konstitusi	54
3. Penafsiran Konstitusi	58
a. Pendekatan Penafsiran	60
b. Metode Penafsiran.....	62

BAB III

TINJAUAN HISTORIS PEMBENTUKAN PASAL 33 UUD 1945 DAN

RANGKUMAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKAITAN

DENGAN PASAL 33 UUD 1945..... 67

A. Tinjauan Historis Pembentukan Pasal 33 UUD 1945	67
B. Rangkuman Putusan Mahkamah Konstitusi.....	81
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	81
a. Para Pihak	81
b. Duduk Perkara dan Alasan Permohonan.....	82

c. Pertimbangan Hakim.....	84
d. Putusan.....	88
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.....	89
a. Para Pihak	89
b. Duduk perkara dan Alasan Permohonan.....	90
c. Pertimbangan Hakim.....	93
d. Putusan.....	96
3. Rangkuman Putusan Mahkamah Kofinancial Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	97
a. Para Pihak	97
b. Duduk perkara dan Alasan Permohonan.....	99
c. Pertimbangan Hakim.....	102
d. Putusan.....	106
4. Rangkuman Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 036/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	107
a. Para Pihak	107
b. Duduk Perkara dan Alasan Permohonan.....	108
c. Pertimbangan Hakim.....	111
d. Putusan:	116
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.....	117
a. Para Pihak	117
b. Duduk Perkara dan Alasan Permohonan.....	118
c. Pertimbangan Hakim.....	122
d. Putusan.....	128

BAB IV

TINJAUAN AMANDEMEN PASAL 33 UUD 1945 MELALUI DOKTRIN CONSTITUTIONAL DISMEMBERMENT DAN PRAKTIK PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI..... 130

- A. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Bentuk Constitutional Dismemberment .. 131
 - 1. Tinjauan Historis Perubahan Pasal 33 UUD 1945 132
 - a. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 dalam Periode Pertama (Tahun 1999) 133
 - b. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 dalam Periode Kedua (Tahun 2000)..... 134
 - c. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 dalam Periode Ketiga (Tahun 2001) 138
 - d. Perubahan Pasal 33 UUD 1945 dalam Periode Keempat (Tahun 2002)..... 145
 - 2. Asas Kekeluargaan dan Demokrasi Ekonomi sebagai Nilai Esensial Pasal 33 UUD 1945..... 158
 - 3. Amandemen Menghilangkan Nilai Esensial dalam Pasal 33 UUD 1945 169
 - a. Konfigurasi Politik Perekonomian pada Era Orde Baru 170
 - b. Perubahan Judul yang Mereduksi Makna Kesejahteraan Sosial 175
 - c. Keinginan Menghapus Asas Kekeluargaan dan Memuat Prinsip Efisiensi dalam Pasal 33 176
- B. Penafsiran Konstitusional Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi 189
 - 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan..... 191
 - a. Tujuan dan Lima Fungsi Penguasaan Negara 192
 - b. Syarat Konstitusionalitas Privatisasi dalam Pengusahaan Listrik 195
 - c. Penyediaan Tenaga Listrik Secara *Unbundling* Bersifat Inkonstitusional 196
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan..... 198
 - a. Sistem Penyediaan Listrik dengan *Unbundling* Konstitusional sepanjang Tidak Menghilangkan Penguasaan Negara 199

b. Keterlibatan Swasta dalam Penyediaan Tenaga Listrik bersifat Inkonstitusional Bersyarat	201
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	203
a. Harga BBM Sesuai Mekanisme Pasar Bersifat Inkonstitusional	203
b. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dengan Sistem <i>Unbundling</i> Bersifat Konstitusional	204
c. Eksistensi Badan Pelaksana Migas Konstitusional	207
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	207
a. Eksistensi Badan Pelaksana Migas Inkonstitusional.....	208
b. Tiga Tingkatan Penguasaan Negara.....	210
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.....	211
a. Restriksi Ketat bagi Pengusahaan Air oleh Swasta.....	211
b. Enam Prinsip Konstitusionalitas Sumber Daya Air	214

BAB V

PENUTUP	225
A. Simpulan	225
B. Saran.....	226
DAFTAR PUSTAKA	228
CURRICULUM VITAE	235

